

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

- Abdul Azis, *Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-Negara Asis*, Pustaka Amanah, Bantul Yogyakarta, 2003
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, yang dikutip oleh H. Dahlan Thaib et.al, *Teori dan Hukum Konsitusi*, Cetakan Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- , *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Andi A. Mallarangeng, "Otonomi dan Federalisme" dalam Adnan Buyung Nasution dkk, *Federalisme Untuk Indonesia*, Kompas, Jakarta, 1999
- Aries Djaenuri, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, PEM4214/MODUL 1
- Armida S. Alisjahbana, *Desentralisasi Kebijakan Fiskal dan Tuntutan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2009
- Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Binacipta : Jakarta, 1985
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, disertasi doktor dalam Hukum Tata Negara Fak. Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung. 1990

- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FHUII, Yogyakarta, 2001
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1996
- C.F. Strong, *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Forms*, Edited with a New Introduction by M.G. CLARKE, M.A., Sidgwick & Jackson, London, 1972
- Cheema, G.S and Rondinelli. G.A (editors) : *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills, Sage. 1983
- Cummings Stephen, *Centralization and Decentralization: The Neverending Story of Separation and Betrayal*’ dalam *Scandinavian Journal of Management*.Vol. 11, No. 2. 1995
- Djaenuri Aries, *Organisasi Pemerintahan Daerah*, UT, Jakarta, 2008
- Hadi Sasana, Analisis Dampakdesentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, 2006
- Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung: 2008
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2005
- Inu Kencana Syafi’, *Sistem pemerintahan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta: 1999
- Jennie Litvack, Junaidi Achmad, and Richard Bird, *Rethinking Decentralization in Developing Countries*, The World Bank Washington D.C, USA, 1999

- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusionalisme, Cita Negara Hukum dan Keniscayaan NKRI*, Orasi Ilmiah dalam Rangka Dies Natalies Universitas Nasional dan Wisuda Pasca Sarjana, Sarjana, dan Diploma III, Jakarta, 11 Oktober, 2004
- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Konstitusi press, Jakarta, 2011
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, The Habibie Center, Jakarta, 2001
- Kuncoro, *Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004
- K. C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, terj. Imam Baehaqie, Bandung : Nusamedia, cet. V, 2011
- Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media : Yogyakarta, 1999
- Maria. S.W Sumardjono, *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, PT. Kompas media Nusantara, Jakarta, 2007
- Marzuki, M. Laica, 2007. *Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI - Jurnal Konstitusi Vol. 4 Nomor 1 Maret 2007*, Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Muhammad Ali Hapsah dan Wawan Mas'udi, *Paradoks Desentralisasi dan Kesejahteraan: Kalimantan Timur Kaya Tapi Miskin*, Jurnal Desentralisasi Volume 10 Nomor 2. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, 2012
- Munir, Sirojul. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indoneisa Konsep, Azas dan Aktualisasinya*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2013

- Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Djilid Pertama*, Jakarta: Siguntang, 1971
- Ni'matul Huda, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Bumi Aksara, Jakarta: 2005
- Philipus, M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi*, UGM Press, Yogyakarta, cetakan ke sepuluh, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2006
- Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam pasal 28 UUD 1945*, yang dalam Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, ToTal Media, Yogyakarta, januari, 2007
- S. T Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (lihat lagi Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia yang ditulis E. Utrecht), Liberty, Yogyakarta: 2004
- S.Schiavo-Campo and P.S.A. Sundaram, *To Serve and To Preserve: Improving Public Administration in A Competitive World*, Asian Development Bank, 2001
- Samodra Wibawa, *Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press : Jogjakarta. 2005



Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Jakarta: 2003

Solly Lubis, *Perkembangan Garis Politik dan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah*. Alumni : Bandung, 1983

The World Bank, *Independent Evaluation Group. Decentralization in Client Countries –An Evaluation of World Bank Support, 1999-2007*, 2008

Wirjono Prodjokoro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Perpu No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Terlantar

### **C. Internet**

Diakses pada : <http://kbbi.kata.web.id>, Tanggal 1 Februari 2018, Pukul 14.20 Wib

Diakses pada : <http://nanangchairudin.com/> Pembangunan.nasional, Tanggal 15 Januari 2018, Pukul 13.00 WIB

Diakses pada : <https://trimongalah.wordpress.com/2016/02/05/otonomi-daerah-makna-dan-implikasinya/>, Tanggal 2 Februari 2018, Pukul 11.40 Wib

Dwi Sudaryanti, *Bentuk Negara Federasi Dan Kesatuan*, diakses pada

[Http://Www.Academia.Edu/7222740/Bentuk\\_Negara\\_Federasi\\_Dan\\_Negara\\_Kesatuan\\_Published](Http://Www.Academia.Edu/7222740/Bentuk_Negara_Federasi_Dan_Negara_Kesatuan_Published)

Tanggal 1 Januari 2018, Pukul 11.30 Wib